

BURSA & FINANSIAL

PERBANKKAN

Profil Calon Deputy Gubernur BI Pengganti Erwin Rijanto

NERACA

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan uji-keputusan dan kelayakan (fit and proper test) kepada 3 (tiga) calon Deputy Gubernur Bank Indonesia yaitu Jуда Agung, Aida S. Budiman, dan Doni P. Joewono pada dua hari berturut-turut (7 hingga 8 Juli 2020) di Jakarta.

Pada kandidat pertama yaitu Jуда Agung yang kini menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial. Jуда Agung lahir di Pontianak, pada tahun 1964. Jуда menempuh pendidikan Teknologi Industri Pertanian pada tahun 1981 di Institut Pertanian Bogor.

Juga telah memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991 sebagai staf Urusan Ekonomi dan Statistik, dan selanjutnya sebagai Peneliti Ekonomi Junior di Bagian Studi Ekonomi Makro, Struktur dan Pengembangan Pasar Keuangan.

Mengawali karier pada tahun 1991 sebagai staf Analisis Inflasi dan Proyeksi Perekonomian Indonesia, Aida memiliki banyak pengalaman di bidang perumusan kebijakan moneter, internasional, dan baurannya dengan kebijakan reformasi struktural.

Aida pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif, International Monetary Fund, South East Asia Voting Group office, mewakili 13 negara yang tergabung dalam SEAVG office terutama untuk isu capital flows management dan implikasinya bagi negara berkembang.

Kandidat ketiga yakni Doni P. Joewono yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Doni Primanto Joewono lahir pada tahun 1965 di Surabaya.

Doni memulai karirnya di Bank Indonesia sebagai analis di Departemen Pengelolaan Moneter pada tahun 1991 dan melanjutkan karir di bidang statistik.

Empat Bank Ajukan Dana Talangan PEN

NERACA

Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan, hingga saat ini ada empat bank yang mengajukan klaim dana talangan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembiayaan sektor UMKM.

Ia mengatakan, jika tidak ada klaim yang diajukan, maka akan terjadi potensi keterlambatan pembayaran pemerintah atas biaya-biaya yang dikeluarkan bank penyalur.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, selama pandemi COVID-19 pihaknya melakukan tiga langkah strategis. Yaitu, langkah penyelamatan pelaku UMKM, implementasi program PEN, dan tetap menyalurkan kredit UMKM selama pandemi COVID-19.

Bagi Supari, ketika aktivitas ekonomi masyarakat sudah kembali menggeliat, UMKM harus ditopang dengan permodalan baru.



KERJASAMA JAMINAN KREDIT MODAL KERJA : Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (keempat kanan) dan Direktur Utama PT Jamkrindo Randi Arto (ketiga dari kiri) mengangkat tangan simbol jempol usai menyaksikan penandatanganan kerja sama penjaminan kredit modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di kantor PT Jamkrindo, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Kocok Ulang Pimpinan OJK dan BI

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Dito

Ganinduto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahkan tak ragu untuk melakukan kocok ulang atau penggantian kepemimpinan jika tak ada perbaikan kinerja secara signifikan dalam penanganan pandemi COVID-19.

NERACA

Dito mengatakan pertimbangan tersebut juga seiring keputusan DPR yang telah memasukkan Revisi Undang-Undang Bank Indonesia, UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) UU Prioritas 2020.

"Ada masalah leadership, mungkin hal itu kita perlu kaji ulang, tidak apakah sudah. Kalau perlu kita kocok ulang kalau memang masih seperti ini, karena banyak sangat terdampak dengan situasi saat ini, mereka seharusnya kerja extra ordinary di masa seperti ini," kata Dito seperti dikutip Antara, Selasa (7/7).

Dito mengatakan evaluasi kinerja BI dan OJK harus segera dilakukan, terlebih karena tidak ada kepastian kapan tekanan ekonomi

dari pandemi COVID-19 ini akan usai. Bahkan, dia mengatakan tak menutup kemungkinan UU OJK juga akan direvisi dan masuk dalam Prolegnas tahun ini.

Dalam revisi UU BI tersebut, Dito mewacanakan perubahan dalam ketentuan yang mengatur kepemimpinan dan juga beberapa peraturan. "Setiap hari terus mutasi saja pembahasannya ini mengenai BI dan OJK. Ini ada masalah peraturan dan leadership di dua lembaga ini. Maka itu peraturannya juga akan kita ubah," ujar dia.

Dito menyebutkan peraturan mengenai syarat pemberhentian Dewan Gubernur BI di UU BI juga akan menjadi salah satu usulan revisi. "Memang sudah diatur pemberhentian di UU, tapi bisa saja kami revisi, kami sedang mempelajari," ujar Dito yang berasal dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Menurut dia, urgensi

untuk mengevaluasi kepemimpinan di BI dan OJK ini karena langkah kedua lembaga regulator sistem keuangan itu dinilai terlalu lamban dalam memitigasi tekanan ekonomi akibat COVID-19. Hal itu juga termasuk dalam alatnya kesepakatan untuk berbagi beban (burden sharing) dengan pemerintah.

"Setiap hari mutasi, rencana pengalihan ini juga berpotensi menggerus kepercayaan investor karena seolah-olah tidak ada kepercayaan jangka panjang terhadap kelembagaan negara yang mengurus pengawasannya." Selain itu, lanjut dia, rencana pengalihan ini juga berpotensi menggerus kepercayaan investor karena seolah-olah tidak ada kepercayaan jangka panjang terhadap kelembagaan negara yang mengurus pengawasannya.

Beberapa waktu terakhir, pengawasan keuangan diwacanakan akan dialihfungsikan dari OJK ke BI, lantaran OJK dianggap kurang mampu melakukan pengawasan keuangan.

Disamping itu, pemerintah juga diminta lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, langkah yang kurang matang bisa mengakibatkan berbagai masalah baru di tengah kondisi perekonomian yang sedang kesulitan akibat pandemi covid-19. "Pemerintah agar melakukan pembenahan dan reformasi dalam tubuh OJK, bukan mengalihkan fungsinya ke Bank Indonesia (BI)," kata Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarif Hasan.

Menurut Syarif, meskipun kinerja OJK belum sesuai harapan, namun bukan alasan tepat untuk mengalihkan kebijakannya ke

BI, karena akan membutuhkan waktu, pikiran, energi, dan dana cukup besar yang harusnya difokuskan pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Wacana pengalihan ini dapat menjadikan industri keuangan menjadi terdistraksi di tengah hantaman pandemi covid-19," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, rencana pengalihan ini juga berpotensi menggerus kepercayaan investor karena seolah-olah tidak ada kepercayaan jangka panjang terhadap kelembagaan negara yang mengurus pengawasannya.

Beberapa waktu terakhir, pengawasan keuangan diwacanakan akan dialihfungsikan dari OJK ke BI, lantaran OJK dianggap kurang mampu melakukan pengawasan keuangan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini lantas kembali mengingatkan tujuan pembentukan OJK, yang mana OJK merupakan bagian dari upaya pemerintah dan DPR RI dalam melakukan reformasi keuangan waktu itu. "Meski lembaga ini baru dibentuk pada tahun 2011 melalui UU Nomor 21 Tahun 2011, namun cita-cita pembentukannya sudah ada sejak krisis moneter 1998/1999," ujarnya. @hari

Skema Bagi Beban BI dan Kemenkeu

NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) bagi beban atau beban sharing dalam penanganan covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada tiga skema yang disiapkan.

"Kebijakan fiskal dan moneter diletakkan dalam posisi sejajar sebagai penjamin dan pengelola ekonomi Indonesia agar tidak hanya terpaku kondisi COVID-19 namun juga berpikir dalam mengelola jangka menengah dan panjang secara prudent, sustainable, dan hati-hati," kata Sri Mulyani, seperti dikutip Antara, kemarin.

Sri Mulyani mengatakan biaya penanganan COVID-19 yang mencapai Rp695,2 triliun telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan terdiri dari beberapa kategori yaitu public goods/benefit serta non-public goods/benefit. Pembiayaan public goods terdiri dari pembiayaan di bidang kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan Pemda Rp106,11 triliun.

Sri Mulyani menyatakan ketiga pos dengan total pembiayaan Rp397,56 triliun tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang langsung dibeli oleh BI dengan suku bunga acuan sebesar reverse repo rate yang seluruhnya akan ditanggung oleh BI juga. "Sehingga beban bunga bagi pemerintah

untuk SBN khusus yang diterbitkan dengan private placement untuk pemerintah nol persen dan BI sebesar reverse repo rate," ujarnya.

Kemudian Sri Mulyani mengatakan untuk belanja yang bersifat non-public goods/benefit yaitu dukungan dunia usaha UMKM Rp123,46 triliun dan Korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun akan dilakukan melalui penerbitan SBN di pasar dengan kesepakatan suku bunga pasar dibagi dua antara pemerintah dan BI.

Ia menjelaskan pemerintah akan menanggung suku bunga satu persen di

bawah reverse repo rate BI, sedangkan BI menanggung bunga antara satu persen di bawah reverse repo rate hingga market ratenya. "Dia diterbitkan di pasar tradable dan marketable maka pemerintah dan BI separtak suku bunga pasar akan dibagi dua. Ini dilakukan melalui mekanisme market," ujarnya.

Selanjutnya, untuk belanja lain yang terkait insentif usaha dan belanja-belanja komitmen pemerintah sebesar Rp328,87 triliun maka SBN akan diterbitkan melalui mekanisme pasar dan seluruh suku bunga ditanggung pemerintah. @hari

Harum Energy logo and text: REVISI PENGUMUMAN PENUNDAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Harum Energy Tbk. ("Perseroan")

Singleterra logo and text: PT SINGLETERRA TBK ("Perseroan") PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM Dengan ini diumumkan kepada pemegang saham PT Singleterra Tbk ("Perseroan") bahwa, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada Jumat, 14 Agustus 2020.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK logo and text: PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk ("PERSEROAN") Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 (untuk selanjutnya disebut "POJK 15/2020"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumin kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diadakan pada hari Jumat, 14 Agustus 2020.

OJK Siapkan Kebijakan Relaksasi Lanjutan

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap menerbitkan kebijakan relaksasi lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi domestik.

"OJK tengah menyiapkan berbagai kemungkinan untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi lanjutan dengan mengizinkan waktu restrukturisasi, batas minimal pemberian kredit, serta dukungan kepada sektor ekonomi yang menjadi pengungkit bergerak kembalinya pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/7).

Sebelum ini, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diawali dengan relaksasi restrukturisasi kredit yang sampai dengan posisi 29 Juni 2020, realisasi restrukturisasi kredit secara keseluruhan di industri perbankan sebesar Rp740,79 triliun untuk 6,56 juta debitur UMKM dan Non UMKM.

Dari jumlah tersebut, realisasi restrukturisasi untuk UMKM sebesar Rp317,29 triliun untuk 5,29 juta debitur dan non-UMKM sebesar Rp423,5 triliun untuk 1,27 juta debitur.

Sementara restrukturisasi pembiayaan di perusahaan pembiayaan, per 30 Juni total outstanding restrukturisasi sebesar Rp133,84 triliun dengan 3,74 juta kontrak disetujui, sedangkan 451.655 kontrak masih dalam proses persetujuan.

Dikatakan, OJK juga telah melakukan pertemuan dengan perbankan dan para pelaku usaha di sektor riil untuk memfasilitasi (link and match) kebutuhan sektor riil untuk kembali menggerakkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan penempatan uang negara sebagaimana yang telah diatur dalam PMK Nomor 70 Tahun 2020.

Pelaksanaan pemberian kredit modal kerja untuk menggerakkan sektor riil khususnya untuk UMKM dengan program penjaminan sebagaimana yang telah diatur dalam PMK Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

OJK pun melakukan sejumlah penyegaran pegawai di lingkungan satuan kerja agar dapat mengakselerasi kebutuhan penanganan pandemi COVID-19. Penyegaran tersebut meliputi pelantikan dan serah terima pejabat yang dilakukan Selasa (7/7) termasuk melakukan mutasi dan promosi terhadap 369 jabatan baik di kantor pusat maupun kantor daerah.

Menurut Wimboh, seiring dengan penanganan krisis kesehatan yang berdampak kepada kondisi perekonomian, OJK telah bahu membahu dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. @hari

Bunga Bank Diminta Turun Jadi Satu Persen

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta pemerintah segera membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menurunkan bunga bank hingga menjadi satu persen, sebagai stimulus pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dapat berjalan lebih cepat.

"Apabila pemerintah mau mengambil sikap seperti itu, saya yakin pemulihan ekonomi tidak akan sampai tiga tahun seperti yang diprediksikan," kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/7). Hal itu dikatakannya dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema "Adaptasi New Normal" di Media Center, Kompleks Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Menurut dia, saat ini hampir semua pengusaha dalam keadaan yang sulit dan tidak likuid karena tanpa adanya keberanian dari pemerintah memberi subsidi, maka perekonomian tidak likuid. Ia memperkirakan pemerintah hanya perlu dana Rp200 triliun untuk menyuntik bunga bank, namun perekonomian nasional akan segera pulih dalam waktu singkat.

Fadel menjelaskan dirinya ketika menjadi Ketua Komisi XI DPR RI berupaya menurunkan bunga bank dari 22 persen menjadi 11 persen, dengan langkah itu, perekonomian bisa lebih cepat tumbuh. "Itu saya yang punya ide, saat itu harus berbicara dengan Menteri Keuangan dan membahas dengan anggota Komisi XI DPR RI. Dalam pertemuan-pertemuan yang ada kita dorong agar ada subsidi bunga bank," katanya.

Dia menjelaskan, saat itu pemerintah tidak berani mengeluarkan subsidi untuk bunga bank sebab selama ini yang ada adalah subsidi listrik, BBM, dan lainnya. Namun, menurut dia, setelah melalui proses akhirnya turun juga subsidi bunga bank sebesar Rp16,8 triliun, dan saat ini bunga bank disebut tinggal sebesar tujuh persen. @hari

IDP logo and text: PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk. Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada: Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020 Pukul : 10.00 WIB Tempat : Mayapada Tower II Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav 28